



PENEGAKAN ATURAN PTKM

Melanggar, KTP Disita dan Sanksi Sosial

KEBIJAKAN Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) bisa dilaksanakan dengan baik apabila diimbangi ketegasan dalam penegakan aturan. Semua itu perlu dilakukan untuk membuat pelaksanaan regulasi dalam waktu singkat berjalan efektif. Untuk itu perlu dipastikan seberapa konsisten pemerintah mengimplementasikan regulasi tersebut. Terutama berkaitan dengan jumlah penduduk yang bisa dikurangi mobilitasnya selama dua minggu pelaksanaan PTKM.

"Kalau dilihat dari evaluasi pelaksanaan PTKM, implementasinya belum bisa dikatakan efektif. Padahal jika ingin mendapatkan hasil besar (signifikan) harus menghemat populasi (mobilitas) sebanyak 70 persen selama dua minggu. Karena kunci keberhasilan PTKM adalah konsistensi yang harus bisa ditunjukkan oleh pemerintah daerah, khususnya perihal penegakan regulasi di lapangan," kata Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dr Rina Andono Ahmad PhD kepada KR, Kamis (21/1).

Rina mengatakan, penambahan kasus Covid-19 di DIY yang tergolong cukup tinggi, tidak hanya dikarenakan mobilitas masyarakat yang tinggi, tapi juga penegakan proses yang masih perlu ditingkatkan. Untuk itu sudah saatnya Pemda DIY kembali melakukan pengendalian dengan mendorong berbagai kegiatan masyarakat sementara waktu dilakukan dari rumah. Tindakan itu perlu dilakukan karena penularan saat ini sudah sangat memprihatinkan hingga mulai membebani sistem kesehatan.

Meskipun sebelumnya sejak awal sudah ada peran dari masyarakat dan pemerintah. Ada pula gerakan pemerintah melalui tracing, testing, treatment (3T) maupun gerakan masyarakat dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak (3M). Namun langkah tersebut dalam pelaksanaannya masih kalah cepat dengan penularan dan penyebaran kasus, sehingga harus diiringi rem mobilitasnya.

"Penekanan kasus bisa dilakukan secara signifikan apabila PTKM dilaksanakan dengan baik. Sebaliknya kalau dalam melaksanakan kebijakan hanya setengah hati, maka hasil yang diperoleh tidak akan bisa optimal. Jadi menghentikan populasi dengan prosentase tertentu perlu dilakukan supaya angka penurunan kasus juga bisa signifikan," jelas Rina Andono.

Berada di kawasan Satpol PP DIY Novia Rahmad. Menurut dia, sejumlah upaya berkaitan dengan PTKM sudah dilakukan, namun dirinya tidak mengesankan apabila masih ditemukan pelanggaran. Sampai 9 hari pelaksanaan kebijakan PTKM masih ditemukan 519 pelanggaran, bahkan ada 16 tempat usaha yang terpaksa harus ditutup sementara waktu (3

Sejak diberlakukan PTKM kawasan Malioboro tampak sepi pengunjung.

x 24 jam). Mayoritas tempat usaha yang ditutup adalah rumah makan, karena setelah diberikan surat peringatan (SP) 1 mereka tetap melakukan pelanggaran. Meskipun jika dibandingkan 7 provinsi lain, di DIY pelanggaran mereka termasuk paling rendah. Karena di daerah lain dalam kurun waktu yang sama jumlah pelanggaran berkisar 2000 sampai 3000 pelanggaran.

"Kami berharap regulasi PTKM yang diberlakukan di DIY dapat berjalan baik. Artinya, dalam rentang waktu 14 hari pelaksanaannya, angka kasus terkonfirmasi positif Covid-19 seharusnya makin menurun. Meskipun berdasarkan evaluasi yang dilakukan sejak diberlakukan PTKM penurunan kasusnya belum terlalu signifikan (sekitar 5 persen). Kondisi ini menjadi tantangan bersama agar ke depan bisa lebih baik," ungkapnya.

Novia menambahkan, kunci kesuksesan PTKM bukan pada pengawasan, tapi lebih pada kedisiplinan individu mengadopsi protokol kesehatan yang berlaku dengan penggunaan masker dan kerumunan, beberapa hal lain akan lebih diintensifkan. Misalnya pengawasan akan dilakukan secara lebih intensif di daerah-daerah yang sering ditemukan banyak pelanggaran, seperti pasar atau tempat usaha lain.

"Apabila nanti ditemukan pelanggaran pelaku tidak hanya akan diberikan sanksi sosial untuk membersihkan jalan atau yang lain. Karena sesuai kesepakatan yang sudah ada, mereka yang melakukan pelanggaran akan diala KTP-nya selama 5 hari sampai 7 hari tergantung SOP. Setelah itu mereka akan dibarengi ke Satpol PP, dimana membuat surat pernyataan, diberikan edukasi dan diminta mengambil

KTP langsung di Satpol PP," papar Novia seraya menambahkan, mudah-mudahan dengan cara itu kesadaran masyarakat untuk mengadopsi protokol kesehatan bisa meningkat.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY Pembujon Setyaningrat tidak henti-hentinya mengingatkan dan menekankan pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 melalui 5M yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas orang-orang yang diwujudkan dalam kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) di DIY.

"Kami berharap meskipun telah dilaksanakan vaksinasi, disiplin terhadap protokol kesehatan tetap harus kita lakukan. Disiplin dalam memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas tetap harus digalakan," katanya.

Pembujon mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan evaluasi terkait trend penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 selanjutnya selama lebih dari sebulan diberlakukannya PTKM di DIY. Dikatakan memang terjadi penurunan terhadap jumlah kasus Covid-19 di DIY, namun tidak signifikan hanya berkisar 4,7 atau 5 persen.

"Kami sudah sampaikan kepada pimpinan, kalau sektor ekonomi itu digerakkan, kita tidak melarang kok. Tapi harus sesuai dengan protokol kesehatan, semisal tempat makan harus diberi jarak dan pembatasan orang yang makan di tempat maupun yang melayani pesan antara. Yang penting mereka terus eksis, tidak ditutup selama PTKM ini," ungkapnya.

Melihat kondisi tersebut, Pembujon terus mengingatkan dan mendorong agar menghindari kerumunan. Jika datang ke

suatu tempat ternyata banyak kerumunan maka sebaiknya ditunda. Sayangnya yang terjadi di lapangan tidak demikian. Justru masih ditemui banyak kerumunan hingga saat ini di DIY.

Selanjutnya membatasi mobilitas orang, bukan berarti tidak boleh kemana-mana, masyarakat dipisahkan melakukan mobilitas apabila membutuhkan keperluan pokok. "Jujur saja 3M sendiri belum secara benar dilaksanakan di DIY sejauh ini, sekarang ditambah 2M melalui PTKM," katanya.

Pihaknya juga sudah menyampaikan kepada pimpinan terkait, dilaksanakannya PTKM ini ada dampaknya terhadap penurunan kasus tapi tidak signifikan. "Kami berharap paling tidak kasus Covid-19 di DIY tidak lagi di angka lebih dari 200 kasus perhari, dan kami tidak tahu puncak kasusnya kapan karena lonjakan kasus hariannya masih fluktuatif. Paling tidak kasus Covid-19 harian di DIY bisa kembali di bawah angka 200 kasus, karena tidak mungkin lagi menekan seminimal mungkin di bawah 100 kasus perhari," terangnya.

Menurut Pembujon, jika PTKM ini bisa dilaksanakan dan dipatuhi sebaik-baiknya maka selanjutnya bisa membantu menekan penularan kasus Covid-19. Seperti arahan Gubernur DIY yang menyampaikan agar masyarakat dengan modal solanya mulai mengaktifkan portal akses satu pintu guna membantu pembatasan mobilitas warga di eraanya masing-masing. "Jika masyarakat DIY banyak yang sakit, kita semua ikut susah apalagi sampai kelaparan. Jadi SM ini harus benar-benar dilaksanakan bersama dengan disiplin dan kesadaran diri supaya pembatasan atau pengetatan yang kini diberlakukan tidak diperpanjang terus-menerus," imbuhnya.

Presidium Paguyuban Kawasan Malioboro Sujawo Putro mengatakan,

Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL), terutama PKL kuliner yang berjualan di Malioboro jauh berkurang sejak diberlakukan PTKM. Bahkan, PKL lesehan, Pasar Serthir dan Pasar sore di Malioboro memilih tidak berdagang sedari awal kebijakan tersebut dilaksanakan karena hanya bisa berjualan efektif selama 30 menit sampai 1 jam. Ditambah lagi, faktor pengurangan Malioboro yang turun drastis. PKL yang tetap membuka usaha menerapkan protokol kesehatan secara baik seperti memakai masker dan mencuci tangan.

Kelua dan pengurus Paguyuban PKL tidak lebih ikut mengingatkan anggotanya untuk mematuhi protokol kesehatan. "Anggota Paguyuban PKL pun memiliki kesadaran pentingnya penegakan disiplin menjaga protokol kesehatan karena menyangkut kesehatan mereka dan pengunjung," katanya.

Sujawo mengungkapkan, komunitas PKL di DIY sudah terpalui akibat pandemi Covid-19, apalagi dengan diberlakukan PTKM maka sangat memberatkan dan menyulitkan. Komunitas PKL di DIY juga sangat mengetahui betul bahwa penghentian PTKM tergantung pada disiplin mereka menjaga protokol kesehatan saat berjualan. PKL siap dan harus siap melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin ketat. Supaya lebih efektif, pemerintah bisa menegakkan kembali hal tersebut kepada para pengurus, termasuk menerapkan sanksi terhadap pelanggaran.

Kelua PTKM diperpanjang, teman-teman PKL meminta agar jam operasional diperpanjang sampai pukul 22.00. Artinya, bagi PKL kuliner, mereka bisa menerima konsumen untuk makan di tempat sampai batas waktu jam tersebut. Sudahnya dan karakter konsumen yang berkunjung ke PKL kuliner, tidak bisa dipukul rata semisal lesehan dan angkringan. Sebab orang yang memilih makan di tempat karena ingin menikmati suasana di kawasan Malioboro," imbuhnya.

Berdasarkan laporan rapat perwakilan PKL se-DIY melalui Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) di DIY, PKL rata-rata mengalami penurunan omzet di atas 50 persen sejak PTKM di DIY diberlakukan pada 11 Januari 2021 lalu. Jika PTKM di DIY yang diperpanjang selama berakhir 25 Januari 2021 artinya diperpanjang hingga 14 hari ke depan, dipastikan PKL di DIY yang notabene merupakan pelaku usaha mikro kecil akan semakin terpuruk.

"Kasihan teman-teman PKL, mereka sudah jauh akibat dampak pandemi Covid-19 masih harus terimpa lagi dengan adanya pembatasan jam operasional," tandas Sujawo. (Ria/Ra)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 17 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005